



UNESA

Universitas Negeri Surabaya

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**“Kewarganegaraan Transformatif
dalam Masyarakat Multikultural”**

Rabu, 30 Agustus 2017

Gedung Srikandi (I6)

Universitas Negeri Surabaya



“Growing With Character”

PROSIDING

Seminar Nasional Prodi PPKn
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Tema:

“Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural”
Surabaya, 30 Agustus 2017

Speaker:

Dr. Wawan Purwanto, MH (Direktur Informasi Badan Intelijen Negara)
Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA (Ketua AP3Knl Pusat)
Prof. Dr. Warsono, MS (Rektor Unesa)



Penerbit
Unesa University Press

PROSIDING

Seminar Nasional Prodi PPKn, Jurusan PMP-Kn
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Tema:

“Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural”

Steering Committee:

Prof. Dr. Warsono, MS (Rektor Unesa)
Prof. Dr. Sarmini, M.Hum (Dekan FISH, Unesa)
Dr. Totok Suyanto, M.Pd (Kaprod PPKn, FISH, Unesa)

Organizing Committee:

Dr. Harmanto, M.Pd
Siti Maizul Habibah, S.Pd., MA
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP
Drs. I Made Suwanda, M.Si
Lisytaningsih, S.Pd., M.Pd
Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si
Rahmanu Wijaya, SH., MH

Editor:

Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si
Iman Pasu M. H. P, SH., MH

Reviewer:

Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
Dr. Suharningsih, M.Si
Dr. Turhan Yani, MA

Published By:

Prodi PPKn, Jurusan PMP-Kn, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang Surabaya, Telp. (031) 8280009 Psw. 409
Email: jurusanpmpkn@gmail.com

vii, 294 hal., Illus, 21 x 29,7

ISBN : 978-602-449-100-0

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatNya lah seminar nasional yang bertema *Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017. Seminar nasional ini diselenggarakan program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Jawa Timur. Kegiatan seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Universitas Negeri Surabaya.

Pada tahun 2017 ini bangsa Indonesia akan memasuki tahun ke-72 sebagai negara. Menjelang Indonesia Merdeka berusia 100 tahun, Indonesia akan mendapat bonus demografi. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus peluang bagi Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya. Salah satu unsur penting dan akan berpengaruh signifikan terhadap perwujudan generasi emas adalah kesadaran akan pentingnya kewarganegaraan transformatif. Fokus kewarganegaraan transformatif adalah perhatian untuk merekonstruksi masyarakat dalam mengembangkan pemahaman kritis dan keterlibatan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, serta aktif dalam lembaga-lembaga sosial yang sesuai dengan pilihannya. Fokus ini tampaknya menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan dalam rangka mewujudkan keadaban dunia tanpa bertentangan dan menghilangkan multikultur pada masing-masing negara.

Dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan transformatif, membutuhkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn-PPKn) yang menekankan saling ketergantungan manusia. Bellah *et al.* (1985) menggunakan konsep "ekologi sosial" untuk menunjukkan bahwa, "manusia dan masyarakat memiliki tindakan yang saling terkait, dan berbagai hal yang diambil memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi kehidupan orang lain". Dengan demikian pemahaman tentang saling ketergantungan, kepedulian, kemauan dan kemampuan untuk saling berkontribusi, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pendidikan kewarganegaraan.

Hasil seminar nasional ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan (1) bahan rujukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kewarganegaraan transformatif dalam berbagai perspektif, (2) pimpinan perguruan tinggi untuk menghasilkan *output* (luaran) praktis dalam bentuk peta jalan (*road map*) dan bahan kajian pencapaian kewarganegaraan transformatif agar dapat melakukan akselerasi pembangunan yang berkeadaban yang berbasis pada hasil penelitian, (3) lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka menumbuhkan kembangkan warga negara transformatif peserta didik sebagai *young citizenship*, (4) bahan untuk menentukan strategi dan pengembangan warga negara transformatif bagi pendidik, (5) dasar bagi masyarakat dalam rangka membangun dan memperkuat jejaring *stakeholders* yang menaruh perhatian akan pentingnya kewarganegaraan transformatif dalam perspektif kewarganegaraan transformatif dalam masyarakat multikultural.

Surabaya, 30 Agustus 2017

Panitia Seminar Nasional Prodi PPKn, FISH,
Unesa

DAFTAR ISI

Hal

<i>Hukum Adat Samawa sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural</i>	1
<i>Abdul Sakban dan Wayan Resmini</i>	
<i>Kewarganegaraan Transformatif Bagi Kepala Daerah, Studi Pilkada DKI Jakarta 2017</i>	9
<i>Agus Machfud Fauzi</i>	
<i>Menguatkan Integrasi Nasional dalam Kesadaran Kelompok Etnik</i>	15
<i>Agus Suprijono</i>	
<i>Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Intelektual Warga Negara di Era Digital</i>	23
<i>Agus Suprijanto</i>	
<i>Kewarganegaraan Transformatif Menuju Masyarakat Madani</i>	31
<i>Arie Supriati</i>	
<i>Pemahaman Warga Negara terhadap Hak dan Kewajiban Mempunyai Peran Penting dalam Kewarganegaraan Transformatif</i>	37
<i>Badruli Markati</i>	
<i>Penguatan Masyarakat Multicultural dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia</i>	44
<i>Bernarda Meteray</i>	
<i>Digitalisasi Warga Negara dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Generasi Emas 2045</i>	52
<i>Beti Indah Sari</i>	
<i>Penanaman Jiwa Profetik-Patriotik dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Prasyarat Kewarganegaraan Transformatif</i>	60
<i>Dikdik Baehaqi Arif, Syifa Siti Aulia dan Susena</i>	
<i>Perlindungan Merek Dagang Bagi IKM Sambal Pecel di Kota Madiun untuk Bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN</i>	68
<i>Farida Styaningrum, Indriyana Dwi Mustikarini</i>	
<i>Meningkatkan Softskill Kewirausahaan Melalui Program KKN Berbasis Kewirausahaan Menggunakan Metode Self Regulated Learning</i>	75
<i>Ratna Nurdiana, Hadi Suryanto dan Yayuk Chayatun Machsunah</i>	
<i>Problematisasi Hukum Perpu Ormas</i>	85
<i>Hananto Widodo</i>	
<i>Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah untuk Mewujudkan Warga Negara Transformatif</i>	93
<i>Listyaningsih dan I Made Suwanda</i>	

<i>Sayan: Mekanisme Gotong Royong Pada Masyarakat Multiagama (Studi di Desa Resapombo, KecamatanDoko, Kabupaten Blitar)</i>	101
<i>Katon Galih Setyawan dan Kusnul Khotimah</i>	
<i>Dakwah Transformatif Berbasis Pendidikan Multikultural</i>	109
<i>Mukhlishi</i>	
<i>Guru Kreatif, Inovatif, dan Inspiratif untuk Menciptakan Transformasi Pendidikan</i> ...	119
<i>Nur Hamidah</i>	
<i>Kajian Pendidikan Multikultural di Sekolah: Upaya untuk Menanamkan Nilai Keberagaman pada Peserta Didik</i>	127
<i>Totok Suyanto</i>	
<i>Tantangan Dan Hambatan Internalisasi Civics Literasi untuk Masyarakat Multikultural Melalui Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar</i>	134
<i>Fatahillah</i>	
<i>Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia: Mazhab Petrus Irianto Jabarmase dan Pembaharuan</i>	149
<i>Petrus Irianto dan Sapriya</i>	
<i>Ekoliterasi Sebagai Dasar Pembentukan Ecological Citizenship Siswa (Studi Pengaruh Ekoliterasi Terhadap Sikap Ecologycal Citizenship Siswa SMPNegeri 11 Surabaya</i>	157
<i>Qurotul Fitriani, Fitri Uswatun Hasanah, dan Khalimatus Sa'diyah</i>	
<i>Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa dalam Rangka Membangun Warga Negara yang Transformatif</i>	165
<i>Rr. Nanik Setyowati, Maya Mustika Kartika Sari dan Siti Maizul Habibah</i>	
<i>Model Evaluasi Countenance Stake Pada Program Pembelajaran PPKn Kelas VII SMP Negeri 1 Bolo Kabupaten Bima</i>	173
<i>Hafsah</i>	
<i>Merajut Kebhinnekaan Menuju Kewarganegaraan Transformatif</i>	187
<i>Septina Alrianingrum</i>	
<i>Dilema Pilkada Langsung dan Pragmatisme Warga Negara</i>	195
<i>Sunarto Amus dan Hasdin</i>	
<i>Menguatkan Integrasi Nasional dalam Kesadaran Kelompok Etnik</i>	203
<i>Agus Suprijono dan Sugeng Herianto</i>	
<i>Pendidikan untuk Anak-Anak Indonesia di Sabah-Malaysia untuk Membentuk Warga Negara Transformatif dari Luar Negeri</i>	212
<i>Yuni Wulan A.</i>	
<i>Urgensi Pembelajaran Sosiologi sebagai Penguatan terhadap Pemberantasan Bullying di Sekolah pada Materi “Perbedaan, Kesetaraan dan Harmoni Sosial”</i>	222
<i>Muhammad Masruro dan Yusuf Aldy Tri Utomo</i>	

<i>Konsep dan Gerakan Multikulturalisme dalam Sejarah Peradaban Islam</i>	232
<i>Kunawi Basyir</i>	
<i>Aktualisasi Islam dan Pancasila dalam Masyarakat Multikultural Indonesia</i>	246
<i>Muhammad Turhan Yani</i>	
<i>Membangun Warganegara Transformatif Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah</i>	251
<i>Nur Wahyu Rochmadi</i>	
<i>Rekonstruksi Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Via Project Netizen Aku Cinta Produk Indonesia</i>	262
<i>Mohammad Syaifudin, Nurul Zuriah, dan Marhan Taufik</i>	
<i>Mengembangkan Nilai-Nilai Kewarganegaraan Transformatif di Sekolah Melalui Pendekatan Integrasi</i>	273
<i>Harmanto</i>	
<i>Diskursus Gender Egalitarian dalam Pendidikan Calon Guru Sebagai Upaya Pembentukan Warga Negara Transformatif</i>	284
<i>Oksiana Jatiningih</i>	

PENANAMAN JIWA PROFETIK-PATRIOTIK DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PRASYARAT KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF

Dikdik Baehaqi Arif, Syifa Siti Aulia, Susena
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id, syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id, ihsusen@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji upaya penanaman jiwa profetik-patriotik warga negara untuk mendorong tumbuhnya kewarganegaraan transformatif. Warga negara yang memiliki jiwa profetik-patriotik ditandai oleh tiga karakter utama, humanisasi, berjiwa liberasi, dan transendensi. Mereka yang berjiwa profetik-patriotik akan mampu mentransformasikan visi dan misi kenabian ke dalam realitas sosial dengan semangat Ilahiah. Mereka berani membiasakan yang benar, tidak lekas putus asa, dan mampu merajut kebersamaan di antara warga negara yang beragam. Penanaman jiwa profetik-patriotik ini dapat dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk membangun jiwa profetik-patriotik, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak cukup sekadar membelajarkan warga negara tentang wawasan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kenegaraan, melainkan perlu menanamkan nilai-nilai kebaikan utama warga negara melalui pembiasaan dan keteladanan. Nilai-nilai profetik perlu ditanamkan dan dibiasakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar warga negara memiliki rujukan keteladanan hakiki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai prasyarat kewarganegaraan transformatif.

Kata kunci: profetik-patriotik, kewarganegaraan transformatif, keteladanan, pendidikan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Dalam penggalan lagu Garuda Pancasila terselip kata "...patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu". Seorang patriot, mereka yang berjiwa pahlawan akan sedia berkorban atas apa yang diperjuangkannya. Demikianlah warga negara Indonesia yang dicita-citakan. Mereka adalah warga negara patriotik, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Warga negara yang memiliki jiwa patriotik tidaklah lahir dengan sendirinya, ia memerlukan proses-proses pendidikan teoretis maupun praktis empiris yang tepat. Untuk itu, perintah Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Uniknya menurut Husaini (2017) "kurikulum sekolah tidak menjadikan iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai intinya....perintah konstitusi adalah tingkatkan akhlak. Tetapi yang dikembangkan justru pendidikan karakter....". padahal pendidikan sejatinya adalah alat utama untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan budi (akhlak) warga dalam merawat bangsa. Bagi Husaini semestinya, proses penanaman iman, takwa, dan akhlak adalah program utama, kurikulum inti atau kurikulumnya".

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai nomenklatur untuk mata pelajaran di sekolah, mata kuliah di perguruan tinggi, maupun aktivitas sosial budaya di

masyarakat memiliki peran dan orientasi yang relevan dalam upaya menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air warga negara. Artinya, PPKn adalah pendidikan kebangsaan yang membina wawasan kebangsaan warga negara. Pendidikan kebangsaan tidak semata-mata hanya pada aspek intelektual yang melahirkan manusia yang cerdas dan terampil, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tetapi yang utama adalah aspek moral spiritual yang membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sanalah, urgensi peneguhan moral spritual warga bangsa dikuatkan melalui PPKn profetik, yang mengintegrasikan nilai-nilai agama (Islam) dalam kajian PPKn.

Pada tataran praksis empiris, integrasi nilai-nilai yang bersumber pada wahyu (nilai agama) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi belumlah menggembirakan. Kaum intelektual seringkali terjebak pada parameter ilmiah dan non ilmiah yang seringkali merujuk [hanya] pada teori-teori yang banyak berasal dari dunia Barat. Demikian pula pada pembelajaran PPKn, baik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maupun pada tingkat pendidikan tinggi, integrasi nilai-nilai agama (lebih khusus nilai-nilai Islam) dengan materi kajian PPKn belumlah banyak dilakukan. Sekalipun demikian, di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, ikhtiar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kajian PPKn telah dirintis oleh Lembaga Pengembangan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menerbitkan buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang di dalamnya juga menambahkan nilai-nilai Muhammadiyah dan ke-Islaman, sehingga para pembaca dan mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam (UMY, 2015). Buku yang telah mengalami dua kali revisi tersebut, digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga telah menerbitkan buku PKn yang bermuatan nilai-nilai Islam, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Taniredja, 2010). Buku itu memuat nilai-nilai Islam, antara lain: PKn dan masyarakat madani; Pemerintahan yang bersih dan demokratis; Transformasi nilai-nilai demokrasi; Transformasi nilai-nilai Islam dalam keluarga; Transformasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat; Islam, musyawarah, dan demokrasi; HAM perspektif Islam; Sistem ekonomi Islam; dan Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Beberapa buku ajar di atas, dimaksudkan agar mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang patriotik dengan tetap berlandaskan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Buku terbaru adalah yang ditulis oleh Khilmiyah (2016) yang menulis buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Berkemajuan. Pembahasan buku ini disajikan secara utuh komprehensif mencakup empat konsensus tersebut dan ditambah tiga bab yang terkait hubungan Muhammadiyah dengan Negara Pancasila, Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, dan Indonesia Berkemajuan.

Apa yang telah dilakukan beberapa kampus Muhammadiyah tersebut, merupakan bagian dari perjalanan sejarah intelektual Islam di Indonesia yang menurut Kuntowijoyo (2008, hal. 520) telah bergeser dari tradisi ideologi ke tradisi keilmuan sejak dasawarsa 1980-an lalu. Integrasi ilmu pengetahuan (khususnya sains sosial) – PPKn merupakan kelanjutan dari tradisi pendidikan ilmu-ilmu sosial (*social studies*) – dengan nilai-nilai Islam telah diusahakan oleh kalangan intelektual di Indonesia. Melalui kajian dan refleksinya, Kuntowijoyo (2008) menyimpulkan bahwa sejak dasawarsa 1980 telah muncul tradisi keilmuan dalam pemikiran Islam. Ilmu-ilmu sosial (Islam) menjadi ilmu transformatif, yang mempunyai kemampuan untuk merekonstruksi masyarakat. Ilmu-ilmu sosial juga ilmu profetik, artinya ilmu yang melaksanakan tugas-tugas kenabian (Kuntowijoyo, 2008).

METODE PENELITIAN

Gagasan tentang penanaman jiwa profetik-patriotik dalam pendidikan kewarganegaraan ini menggunakan studi pustaka sebagai salah satu tradisi dalam penelitian kualitatif. Penulis melakukan studi atas pustaka-pustaka yang relevan. Selanjutnya, data diolah dan melalui tahapan penyusunan data, pengkategorian data, dan pencarian keterhubungan substansi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil kajian pustaka disusun dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jiwa Profetik-Patriotik Warga Negara

Tulisan Latif (2015, hal. 207) tentang usaha menjalankan revolusi Pancasila di tengah kesemarakkan gairah materialisme, hedonisme, dan banalisme sampai pada kesimpulan perlunya kebesaran jiwa yang teguh pendirian dan berani menyimpang dari *mainstream*. Latif (2015) menyebut perlunya Jiwa profetis-patriotis, yang berani membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa; jiwa profetis-patriotis yang tidak lekas putus asa dalam menahan cobaan dan gempuran; jiwa profetis-patriotis yang sanggup menyatukan satuan-satuan lidi pecutan ke dalam sapu kebersamaan gempuran yang dapat melenyapkan krisis dan penyakit sosial. Istilah profetik yang digunakan dalam artikel ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo tentang ilmu-ilmu sosial profetik. Ilmu-ilmu sosial profetik menurut Kuntowijoyo (2008, hal. 482) lahir untuk menjawab pertanyaan tentang transformasi fenomena sosial yang tidak terpecahkan dalam Ilmu Sosial Transformati (sebagai terjemahan dari gagasan Teologi Transformatif) yang pernah diajukan oleh Moeslim Abdurrahman. Bagi Kuntowijoyo (2008, hal. 482) ilmu sosial profetik tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu sosial profetik tidak sekadar mengubah demi perubahan, tapi

mengubah berdasarkan cita-cita etik dan propetik tertentu. Dalam pengertian ini, lanjutnya, maka ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakat. Sedangkan kata patriotik berarti "bersifat cinta pada tanah air".

Secara normatif-konseptual, cita-cita profetik diderivasi dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam QS Ali Imran ayat 110 yang artinya "Engkau adalah ummat terbaik yang diturunkan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemunkaran (kejahatan), dan beriman kepada Allah". Merujuk pada ayat tersebut, ada tiga muatan nilai yang memberikan karakteristik cita-cita profetik, yaitu *amar ma'ruf* (nilai humanisasi) yang mengandung pengertian memanusiakan manusia; *nahyi munkar* (liberasi) mengandung pengertian pembebasan, yaitu pembebasan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan; dan *tu'minuna billah* (transendensi) yang diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosio-etiknya pada masa depan dengan menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan (Kuntowijoyo, 2008, hal. 483).

Secara peristilahan warga negara profetik-patriotik ini ditandai dengan tiga karakter utama, humanisasi, berjiwa liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo 1991:288). Nilai *amar ma'ruf* (nilai humanisasi) dalam konsep Kuntowijoyo mengedepankan pada pola memanusiakan manusia dengan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Nilai humanisasi ini mengarahkan dan membentuk warga negara agar mampu memiliki sikap mencintai tanah air dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaannya yang hakiki. Sikap cinta tanah air sebagai wujud rasa kebangsaan/nasionalisme warga negara berkait berkelindan dengan asas keyakinan/ketuhanan. Huntington (Latif, 2011, hal. 113) menyebut bahwa geografi peradaban yang mampu bertahan adalah geografi peradaban yang berbasis keyakinan/ ketuhanan. Ini artinya bahwa rasa nasionalisme warga negara harus dimaknai sebagai nasionalisme yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Tepatlah kiranya, para pendiri bangsa menjadikan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, sebab ia menjadi pangkal utama bagi sila-sila yang lain secara hierarkis dan pyramidal.

Nilai *nahyi munkar* (liberasi) sebagai nilai kedua warga negara yang berjiwa profetik-patriotik mengedepankan pada proses-proses di mana warga negara mampu mentransformasikan agama menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang objektif, bukan dianggap sebagai sesuatu yang konservatif. Melalui nilai liberasi ini, warga negara yang berjiwa propetik-patriotik akan berusaha melepaskan pemikiran bahwa agama hanyalah sebuah formalitas semata, melainkan justru agama bisa menjawab permasalahan bangsa dan negara. Dalam hal ini, jiwa-jiwa patriotik warga negara yang semakin tergerus perkembangan zaman dapat dijawab melalui pertanyaan apakah agama sudah dijadikan ilmu untuk menjawab permasalahan tersebut? atau apakah agama sebagai sesuatu yang terpisahkan untuk menjawab sikap patriotisme warga negara yang mulai menghilang? Dalam rentang historis

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama pada dasarnya menjadi dasar dalam upaya memperjuangkan berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Bahkan secara konstitusional, pengakuan akan pertolongan Tuhan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia secara tegas dinyatakan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

Nilai *tu'minuna billah* (transendensi) yang diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosio-etiknya pada masa depan sesungguhnya adalah upaya untuk mewujudkan warga negara yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa negara dan warga negara ini terbentuk atas rahmat dari Tuhan YME, sehingga karena fitrahnya itu, warga negara sebagai manusia hendaknya bisa menjaga keutuhan negara dalam rangka perwujudan kodratnya sebagai makhluk Tuhan YME yang memiliki peran sebagai *khalifah* di muka bumi.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Jiwa Profetik-Patriotik

Pendidikan kewarganegaraan memiliki andil besar dalam menguatkan pendidikan di Indonesia, terutama dalam mengembangkan potensi peserta didik sebagai menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks pembelajaran PPKn, Rumusan tujuan pendidikan nasional ini menjadi sasaran bagi terbentuknya warga negara yang memiliki jiwa profetik-patriotik. Jiwa profetik tergambar pada rumusan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sedangkan patriotik tergambar pada rumusan menjadi warga negara yang demokratis. Untuk membangun warga negara yang berjiwa profetik-patriotik tidaklah cukup sekadar membelajarkan warga negara tentang wawasan kewarganegaraan, kebangsaan, kenegaraan, dan jiwa patriotisme, melainkan perlu menanamkan nilai-nilai kebaikan utama warga negara melalui pembiasaan dan keteladanan. Pengembangan jiwa profetik-patriotik dapat dilakukan dengan pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi itu meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yang meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris warga negara, serta watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional (Branson & Quigley, 1998).

Selain ketiga kompetensi kewarganegaraan tersebut, hal penting yang perlu dibangun adalah kecerdasan kewargaan (*civic intelligence quotient*). Istilah kecerdasan kewarganegaraan ini digunakan untuk mengatasi krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia yang akar utamanya adalah krisis jati diri (Latif, 2016:1) yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air warga negara secara kolektif sebagai warga bangsa dan negara. Kecerdasan kewargaan ini adalah hal utama untuk menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang humanis untuk mendukung terbentuknya jiwa profetik-patriotik warga negara.

Kewarganegaraan Transformatif dan Indonesia Berkemajuan

Peran penting PPKn dalam membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan bertanggung jawab sesungguhnya harus dilandasi oleh keyakinan akan nilai ilahiah bahwa manusia adalah makhluk yang ciptaan Tuhan YME yang memiliki peran utama sebagai *khalifah* di muka bumi. Kostruksi berpikir ini memberikan landasan dan arah bagaimana pembelajaran PPKn diselenggarakan.

Tawaran yang disampaikan Latif (2016) tentang perlunya dibangun kecerdasan kewargaan lahir karena adanya krisis kedirian yang bersifat publik yang mencerminkan kelalaian dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mengembangkan kecerdasan kewargaan. Bagi Latif, pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal, dengan mengabaikan usaha mempertautkan keragaman kecerdasan personal itu ke dalam kecerdasan kolektif kewargaan. Masing-masing individu lanjut Latif (2016) dibiarkan menjadi deret "huruf" alfabet, tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan (*bhinneka tunggal ika*) ke dalam "kata" dan "kalimat" bersama. Akibatnya, banyak manusia yang baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya). Ini artinya, bahwa pembelajaran PPKn tidak boleh hanya melulu berkaitan dengan kecerdasan personal warga negara. Tetapi harus bergeser agar memberi peran pada pembentukan kecerdasan kolektif warga negara di ranah publik.

Jiwa profetik-patriotik adalah prasyarat bagi tumbuhnya kewarganegaraan transformatif. Jiwa ini melihat sisi manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus tunduk terhadap perintah pencipta-Nya, disamping mendudukan warga negara sebagai kelompok yang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewarganegaraan transformatif memiliki sandaran ideologis yang kuat, yakni Pancasila. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah jiwanya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan jiwanya warga negara Indonesia (Latif, 2015:30).

Kewarganegaraan transformatif dimaksudkan pula agar cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang berkemajuan dapat tercapai secara optimal. Rumusan negara Indonesia berkemajuan, diderivasi dari rumusan pemikiran Muhammadiyah dalam buku "Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna" yaitu sebagai berikut. Indonesia berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (*al-madinal al-fadhilah*), negara berkemakmuran dan berkeadaban (*umran*), dan negara yang sejahtera. Negara berkemajuan

adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia (Nashir, 2015).

Rumusan di atas menegaskan cita-cita dan tujuan negara berkemajuan sebagai negara utama, berkemakmuran dan berkeadaban, serta negara yang sejahtera. Karena itu dalam pandangan Nashir (2015) konsekuensi dari negara berkemajuan tersebut adalah bahwa negara harus mampu menegakkan kedaulatan (wilayah, politik, hukum, ekonomi, dan budaya); mendatangkan kemakmuran (terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan); mewujudkan kebahagiaan material dan spiritual; menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; menghormati hak asasi manusia; dan menciptakan keamanan dan jaminan masa depan. Artinya, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi harus memiliki kedaulatan agar mampu memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya.

Upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara oleh negara, sekaligus mensyaratkan perlunya upaya membangun keterlibatan warga dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia berkemajuan di atas. Dengan demikian, pada setiap diri warga negara perlu dibangun pemahaman, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara, disamping menuntut hak konstitusional mereka sebagai warga negara, baik secara personal maupun secara kolektif. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban konstitusional warga negara inilah yang melahirkan kewarganegaraan transformatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang jiwa profetik di atas, maka pembelajaran PPKn yang berorientasi pada pembentukan jiwa profetik-patriotik warga negara tidak hanya dilakukan semata untuk mengejar ketercapaian standar kompetensi dan tujuan di dalam kurikulum saja, melainkan harus mengajak peserta didik untuk mengkontekstualisasikan apa yang sedang dibahas dalam kajian PPKn dengan realitas sosial yang sedang terjadi, serta menyertakan nilai-nilai agama dalam setiap kajiannya.

Melalui kontekstualisasi pembelajaran PPKn dan penghubungannya dengan nilai-nilai agama akan lahir warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjunjung tinggi risalah agama yang dibawa oleh para nabi. Pada gilirannya, warga negara demikian akan memiliki kepekaan (*sence of belonging*) akan isu-isu kewarganegaraan yang muncul, dan dengan kecintaannya kepada tanah air, serta keberagamaannya yang kuat, mereka menjadikan agama sebagai petunjuk, arahan dan solusi akan masalah yang ia hadapi. Keterlibatan warga negara dalam pemecahan isu-isu kewarganegaraan itu dilakukan secara kolektif sebagai warga bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M. S., & Quigley, C. N. (1998). *The role of civic education* (Task Force Position Paper from the Communitarian Network). A Forthcoming Education Policy.
- Husaini, A. (2017). Kurtaq 24 Jam. *Suara Hidayatullah: Jaringan Masyarakat Bertauhid*, 61.
- Imawan, R. P. (2016). Urgensi Warga Negara Transformatif. Diambil 24 Agustus 2017, dari http://krjogja.com/web/news/read/11950/Urgensi_Warga_Negara_Transformatif
- KBBI Daring. (n.d.). Arti kata profetik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diambil 23 Agustus 2017, dari <https://kbbi.web.id/profetik>
- Khilmiyah, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Kuntowijoyo. (2008). *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. (A. Priyono, Ed.). Bandung: Mizan.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2015). *Revolusi Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Latif, Y. (2016). Pemuda Cerdas Kewargaan. In B. Mulyono, M. Murdiono, Halili, I. Arpanudin, & Suyato (Ed.), *Penguatan Kajian Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks Kependidikan dan Non Kependidikan* (hal. 1–6). Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FIS UNY.
- Nashir, H. (2015). Muhammadiyah dan Rekonstruksi Politik Kebangsaan. *Suara Muhammadiyah*, 12–14.
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Samsuri. (2012). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Taniredja, T. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Alfabeta.
- UMY. (2015). LP3M UMY Terbitkan Buku PKN Berlandaskan Nilai-Nilai Islam. Diambil 5 April 2016, dari www.umi.ac.id
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.